

# RENCANA KERJA 2025



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmatnya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan bentuk mengaplikasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

Harapan kami Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun anggaran 2025, sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi, 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



**YON HERI, SP, ME**

Pembina Utama Muda

Nip. 19690801 199703 1 007

# **DAFTAR ISI**

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang        | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum        | 3 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan     | 5 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | 7 |

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu<br>dan Capaian Renja Perangkat Daerah | 9  |
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan OPD                                                   | 20 |
| 2.3 | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan<br>Fungsi SKPD                         | 24 |
| 2.4 | Review Terhadap Rancangan Awal OPD                                               | 26 |
| 2.5 | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan<br>Masyarakat                             | 40 |

### **BAB TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA JAMBI**

#### **III**

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 3.1 | Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 41 |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja OPD         | 42 |

|               |                                              |           |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV</b> | <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT</b> | <b>45</b> |
|               | <b>DAERAH</b>                                |           |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP</b>                               | <b>57</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan yang baik sangat penting dan diperlukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi. Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi dengan tidak meninggalkan peranan proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya

Renja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, Renja Perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah. penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sejalan dengan hal



tersebut dan dengan adanya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Public Governance**) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, dokumen

perencanaan merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Selain itu renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian renja merupakan pedoman bagi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penyusunan renja DPMPTSP tahun 2025 merupakan kewajiban bagi DPMPTSP. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang di dalam penjabaran tugas dan fungsi DPMPTSP sebagaimana diinginkan oleh kepala daerah Kota Jambi. Adapun prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja perangkat daerah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD.



2. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD.
3. Rumusan Program/Kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif perangkat daerah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, dan total kebutuhan dana.

Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kota Jambi dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Jambi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan Hukum DPMPTSP Kota Jambi dalam menyusun Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005





4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 39)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1.3.1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Menyediakan dokumen rencana teknis DPMPTSP Kota Jambi dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan



arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai kelompok sasaran kegiatan.

2. Merumuskan Program – Program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja DPMPTSP Kota Jambi atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur.
4. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Jambi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan Pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2025 adalah :

1. Untuk membantu pencapaian hasil pelaksanaan program dan memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun kedepan.
2. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik secara terukur.



3. Menjamin konsistensi perencanaan teknis DPMPTSP Kota Jambi dengan arahan strategis visi dan misi Walikota Jambi terpilih sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Jambi.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk laporan kinerja DPMPTSP Kota Jambi maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Daerah

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika rencana kerja ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RenjaSKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat



### **BAB. III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### **BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB. V PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi – evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Jambi adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Jambi tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

#### ***TABEL REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN TA.2023***

Realisasi program dan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tahun 2023 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diurutkan berdasarkan skala prioritasnya meliputi :



| NO.        | PROGRAM/KEGIATAN                                                            | PAGU DANA            | PENYERAPAN           | REALISASI  |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
|            |                                                                             |                      |                      | TARGET (%) | KEUANGAN (%) |
| 1          | 2                                                                           | 3                    | 4                    | 5          | 6            |
| <b>I</b>   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>7.523.125.162</b> | <b>7.209.868.772</b> | <b>100</b> | <b>95,84</b> |
| <b>I</b>   | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | <b>32.778.830</b>    | <b>30.240.965</b>    | <b>100</b> | <b>92,26</b> |
| 1          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Peramhkat Daerah                             | 22.612.168           | 21.018.900           | 100        | 92,95        |
| 2          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 10.166.662           | 9.222.065            | 100        | 90,71        |
| <b>II</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               | <b>3.978.054.866</b> | <b>3.924.993.453</b> | <b>100</b> | <b>98,67</b> |
| 1          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | 3.643.086.012        | 3.597.785.206        | 100        | 98,76        |
| 2          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verivikasi Keuangan SKPD            | 314.104.465          | 307.032.747          | 100        | 97,75        |
| 3          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD                 | 6.394.424            | 6.311.500            | 100        | 98,70        |
| 4          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 14.469.965           | 13.864.000           | 100        | 95,81        |
| <b>III</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | <b>143.997.000</b>   | <b>141.557.000</b>   | <b>100</b> | <b>98,31</b> |
| 1          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                      | 113.997.000          | 113.997.000          | 100        | 100          |
| 2          | Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  | 30.000.000           | 27.560.000           | 100        | 91,87        |
| <b>IV</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>759.969.720</b>   | <b>733.721.888</b>   | <b>100</b> | <b>96,55</b> |
| 1          | Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik Penerangan Penerangan Bangunan Kantor | 18.151.164           | 17.874.420           | 100        | 98,48        |
| 2          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                                | 201.986.930          | 191.379.021          | 100        | 94,75        |
| 3          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 80.160.826           | 80.116.600           | 100        | 99,94        |
| 4          | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                    | 84.670.800           | 75.027.500           | 100        | 88,61        |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|            |            |                                                                                                                    |                      |                    |            |              |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|
|            | 5          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 375.000.000          | 369.324.347        | 100        | 98,49        |
|            | <b>V</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>839.159.909</b>   | <b>820.350.900</b> | <b>100</b> | <b>97,76</b> |
|            | 1          | Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | 611.780.000          | 595.100.000        | 100        | 97,27        |
|            | 2          | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 133.755.000          | 133.600.000        | 100        | 99,88        |
|            | 3          | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 93.624.909           | 91.650.900         | 100        | 97,89        |
|            | <b>VII</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>1.115.118.197</b> | <b>960.444.367</b> | <b>100</b> | <b>86,13</b> |
|            | 1          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 12.904.244           | 11.679.640         | 100        | 90,51        |
|            | 2          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 513.150.000          | 426.227.517        | 100        | 83,06        |
|            | 3          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 589.063.953          | 522.537.210        | 100        | 88,71        |
|            | <b>VII</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>654.046.640</b>   | <b>598.560.199</b> | <b>100</b> | <b>91,52</b> |
|            |            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 13.000.000           | 9.401.000          | 100        | 72,32        |
|            |            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 313.800,760          | 270.559.199        | 100        | 86,22        |
|            |            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 104.573.700          | 103.565.000        | 100        | 99,04        |
|            |            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 222.672.180          | 215.035.000        | 100        | 96,57        |
| <b>II</b>  |            | <b>Program Pengembanagn Iklim Penanaman Modal</b>                                                                  | <b>71.564.612</b>    | <b>70.120.725</b>  | <b>100</b> | <b>97,98</b> |
|            | <b>I</b>   | <b>Pembuatan Peta Potensi investasi Kabupaten/kota</b>                                                             | <b>71.564.612</b>    | <b>70.120.725</b>  | <b>100</b> | <b>97,98</b> |
|            | 1          | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan                                          | 71.564.612           | 70.120.725         | 100        | <b>97,98</b> |
| <b>III</b> |            | <b>Program Promosi Penanaman Modal</b>                                                                             | <b>263.536.006</b>   | <b>259.403.582</b> | <b>100</b> | <b>98,43</b> |
|            | <b>I</b>   | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | <b>263.536.006</b>   | <b>259.403.582</b> | <b>100</b> | <b>98,43</b> |
|            | 1          | Pelaksana Kegiatan Promosi                                                                                         | 263.536.006          | 259.403.582        | 100        | 98,43        |





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|           |          |                                                                                                                                                                  |                    |                    |            |              |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|
|           |          | Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                            |                    |                    |            |              |
| <b>IV</b> |          | <b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>                                                                                                                         | <b>787.647.034</b> | <b>753.999.058</b> | <b>100</b> | <b>95,73</b> |
|           | <b>I</b> | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>                   | <b>787.647.034</b> | <b>753.647.034</b> | <b>100</b> | <b>95,73</b> |
|           | 1        | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                              | 650.529.167        | 623.813.850        | 100        | 95,89        |
|           | 2        | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                                                        | 76.663.237         | 73.279.508         | 100        | 95,59        |
|           | 3        | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                        | 60.454.630         | 56.905.700         | 100        | <b>94,13</b> |
| <b>V</b>  |          | <b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>                                                                                                          | <b>848.487.841</b> | <b>809.803.654</b> | <b>100</b> | <b>95,44</b> |
|           | <b>I</b> | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    | <b>848.487.841</b> | <b>809.803.654</b> | <b>100</b> | <b>95,44</b> |
|           | 1        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | 117.095.453        | 115.869.040        | 100        | 98,95        |
|           | 2        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                | 293.169.100        | 266.954.154        | 100        | 91,06        |
|           | 3        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | 438.223.288        | <b>426.980.460</b> | 100        | 97,43        |
| <b>VI</b> |          | <b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>                                                                                             | <b>47.262.115</b>  | <b>46.847.500</b>  | <b>100</b> | <b>99,18</b> |
|           | <b>I</b> | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                           | <b>47.262.115</b>  | <b>46.847.500</b>  | <b>100</b> | <b>99,18</b> |
|           | 1        | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 47.262.115         | <b>46.847.500</b>  | 100        | 99,18        |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**



TABEL T-C.29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN                                                       | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM KEGIATAN)                                   | TARGET KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA PD<br>TAHUN 2025) | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>(n-3) 2022 | TARGET DAN REALISASI KINERJA<br>PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU<br>(n-3) |                                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja Perangkat<br>Daerah tahun n-<br>1)2024 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra Perangkat Daerah<br>s/d Tahun berjalan |                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |                                                                        |                                                                          |                                                                    |                                                                                                              | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah tahun<br>(n-2) 2023                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah tahun<br>(n-2) 2023 | Tingk<br>at<br>Realis<br>asi<br>(%) |                                                                                 | Realisasi capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d tahun<br>berjalan                   | Tingkat<br>capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra % |
| 1    | 2                                                                      | 3                                                                        | 4                                                                  | 5                                                                                                            | 6                                                                        | 7                                                             | 8=7/6                               | 9                                                                               | 10=(5+7+9)                                                                           | 11=(10/4)                                              |
|      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Indeks Reformasi Birokrasi                                               | 9.004.000.000                                                      | 6.333.187.391                                                                                                | 7.805.031.966                                                            | 7.209.868.772                                                 | 92,37                               | 7.331.616.428                                                                   | 20.874.672.591                                                                       | 274,94                                                 |
|      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Penilaian Nilai Akip                                                     | 134.000.000                                                        | 31.516.700                                                                                                   | 32.778.830                                                               | 30.240.965                                                    | 92,26                               | 36.056.712                                                                      | 97.814.377                                                                           | 265,4                                                  |
|      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                        | 54.000.000                                                         | 21.999.977                                                                                                   | 22.612.168                                                               | 21.018.900                                                    | 92,95                               | 24.873.384                                                                      | 67.892.261                                                                           | 267,19                                                 |
|      | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                      | 80.000.000                                                         | 9.999.000                                                                                                    | 10.166.662                                                               | 9.222.065                                                     | 90,71                               | 11.183.328                                                                      | 30.404.393                                                                           | 261,41                                                 |
|      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | Pelaksanaan administrasi<br>tugas dan fungsi opd<br>berjalan dengan baik | 5.047.000.000                                                      | 4.177.195.254                                                                                                | 3.987.054.866                                                            | 3.924.993.453                                                 | 98,44                               | 4.211.507.515                                                                   | 12.313.696.222                                                                       | 275                                                    |
|      |                                                                        |                                                                          |                                                                    |                                                                                                              |                                                                          |                                                               |                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                        |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                               |                                                                                                                                                    |                      |                    |                    |                    |              |                    |                      |               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 4.527.000.000        | 3.814.624.262      | 3.643.086.012      | 3.597.785.206      | <b>98,76</b> | 3.891.407.566      | 11.303.817.034       | 273,77        |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 463.000.000          | 339.278.172        | 314.104.465        | 307.032.747        | <b>97,75</b> | 287.874.622        | 934.185.541          | 294,6         |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan yang berlaku   | 5.000.000            | 7.498.730          | 6.394.424          | 6.311.500          | <b>98,70</b> | 11.341.866         | 25.152.096           | 233,39        |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 7.000.000            | 15.794.090         | 14.469.965         | 13.864.000         | 95,81        | 15.794.718         | 43.936.413           | 210,39        |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>                                                                                          | <b>332.000.000</b>   | 188.680.000        | <b>143.997.000</b> | <b>141.557.000</b> | <b>98,31</b> | <b>230.113.400</b> | <b>560.350.400</b>   | <b>188,64</b> |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 153.113.400          | 88.600.000         | 113.997.000        | 113.997.000        | 100          | 153.113.400        | 355.710.400          | 175,1         |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 132.000.000          | <b>100.000.000</b> | 30.000.000         | 27.560.000         | 92           | 77.000.000         | 204.560.000          | 215,58        |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Peningkatan nilai AKIP</b>                                                                                                                      | <b>1.000.000.000</b> | 639.993.810        | <b>759.969.720</b> | <b>733.721.888</b> | 97           | <b>749.583.199</b> | <b>2.123.298.897</b> | <b>265,04</b> |
|  |                                                                               |                                                                                                                                                    |                      |                    |                    |                    |              |                    |                      |               |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|                                                                              |                                                                                        |                      |                    |                      |                    |       |                      |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 25.000.000           | Rp16.998.300       | 18.151.164           | Rp17.874.420       | 98,48 | 19.966.280           | 54.839.000           | 239,26          |
| Kantor                                                                       |                                                                                        |                      |                    |                      |                    |       |                      |                      |                 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 200.000.000          | 123.596.660        | 201.986.930          | 191.379.021        | 94,7  | 143.802.130          | 458.777.811          | 566,58          |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 150.000.000          | <b>90.973.850</b>  | 80.160.826           | 52.269.751         | 65,2  | 80.176.909           | 223.420.510          | 312,76          |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu                                | 250.000.000          | 44.075.000         | 84.670.800           | 75.027.500         | 88,6  | 93.137.880           | 212.240.380          | 161,44          |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 150.000.000          | 364.350.000        | 375.000.000          | 369.324.347        | 98,5  | 412.500.000          | 1.146.174.347        | 175,3           |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Meningkatnya kinerja pelayanan</b>                                                  | <b>500.000.000</b>   | <b>256.442.500</b> | <b>839.159.909</b>   | 820.350.900        | 97,8  | <b>116.845.926</b>   | <b>1.193.639.326</b> | <b>2.034,08</b> |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | <b>150.000.000</b>   | 256.442.500        | 611.780.000          | 595.100.000        | 97,3  | 826.200.000          | 1.677.742.500        | 1.118,49        |
| Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 350.000.000          | 8.893.500          | 133.755.000          | 133.600.000        | 99,9  | 6480000              | 148.973.500          | 42,56           |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik</b>              | <b>1.139.000.000</b> | <b>639.955.650</b> | <b>1.115.118.197</b> | <b>960.444.367</b> | 86,1  | <b>1.226.630.016</b> | <b>2.827.030.033</b> | <b>201,35</b>   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 544.000.000          | 358.850.000        | 513.150.000          | 426.227.517        | 83,1  | 564.465.000          | 1.349.542.517        | 215,49          |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 595.000.000          | 263.027.100        | 589.063.953          | 522.537.210        | 88,7  | 647.970.348          | 1.433.534.658        | 186,98          |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</b>                                             | <b>852.000.000</b>   | <b>398.921.200</b> | <b>654.046.640</b>   | <b>598.560.199</b> | 91,5  | <b>760.879.660</b>   | 1.758.361.059        | <b>160,65</b>   |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|                                                                                                                      |                                                                                                          |                    |                      |                    |                    |      |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 20.000.000         | 9.925.000            | 13.000.000         | 9.401.000          | 72,3 | 14.300.000           | 33.626.000           | 198,25        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 382.000.000        | 204.730.000          | 313.800.760        | 270.559.199        | 86,2 | 277.640.000          | 752.929.199          | 236,63        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 150.000.000        | 129.466.200          | 104.573.700        | 103.565.000        | 99,0 | 115.031.070          | 348.062.270          | 266,17        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 300.000.000        | Rp54.800.000         | Rp222.672.180      | Rp215.035.000      | 97   | 200.000.000          | 477.472.180          | 159,15        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                    | <b>Peningkatan Jumlah Investor berskala Nasional yang berinvestasi di Kota Jambi</b>                     | <b>87.000.000</b>  | <b>71.323.400</b>    | <b>71.564.612</b>  | 70.120.725         | 98,0 | <b>56.224.800</b>    | 197.668.925          | <b>351,17</b> |
| <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Tersedianya Informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kota Jambi</b>                                 | <b>87.000.000</b>  | <b>71.323.400</b>    | <b>71.564.612</b>  | <b>70.120.725</b>  | 98,0 | <b>163.614.027</b>   | 305.058.152          | <b>250,56</b> |
| Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                       | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal        | 87.000.000         | 71.323.400           | 71.564.612         | 70.120.725         | 98,0 | 163.614.027          | 305.058.152          | 250,56        |
| <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                               | <b>Peningkatan Jumlah Calon Investor/Pengunjung</b>                                                      | <b>250.000.000</b> | <b>233.758.660</b>   | <b>263.536.006</b> | <b>259.403.582</b> | 98,4 | <b>299.789.607</b>   | 792.951.849          | <b>214,68</b> |
| <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Terpromosinya informasi peluang dan Potensi Penanaman Modal di Kota Jambi</b>                         | <b>250.000.000</b> | <b>233.758.660</b>   | <b>263.536.006</b> | <b>259.403.582</b> | 98,4 | <b>299.789.607</b>   | 792.951.849          | <b>214,68</b> |
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Pelaksanaan Investasi di dalam dan luar Kota Jambi                                                       | 250.000.000        | <b>233.758.660</b>   | 263.536.006        | Rp259.403.582      | 98,4 | 299.789.607          | 792.951.849          | 214,68        |
| <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                             | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan</b>                                       | <b>806.300.000</b> | <b>1.069.593.771</b> | <b>787.647.034</b> | <b>753.999.058</b> | 95,7 | <b>1.020.457.941</b> | <b>2.844.050.770</b> | <b>262,06</b> |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                                                                                                | Non Perizinan                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |              |                      |                      |               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Terlaksananya Pelayanan Perizinan konsultasi, pendampingan serta pengaduan Perizinan</b>                                                                                                       | <b>806.300.000</b> | <b>927.143.773</b> | <b>787.647.034</b> | <b>753.999.058</b> | <b>95,73</b> | <b>1.020.457.941</b> | <b>1.947.601.810</b> | <b>262,06</b> |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                      | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | 100.000.000        |                    | 0                  | 0                  |              |                      |                      | 264,23        |
|  | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                          | 541.300.000        | 75.029.870         | 650.529.167        | 623.813.850        | 95,89        | 869.628.284          | 1.568.472.004        | 245,95        |
|  | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                               | Jumlah orang yang memperoleh Konsultasi dan terkelolanya pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                                              | 75.000.000         | 49.623.350         | 60.454.630         | 56.905.700         | 94,13        | 66.500.093           | 173.029.143          | 254,15        |
|  | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                     | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 90.000.000         | 82.013.550         | 76.663.237         | 73.279.508         | 95,59        | 84.329.564           | 239.622.622          | 266,24        |
|  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                        | <b>ketaatan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Oleh Investor (LKPM)</b>                                                                                                                           | <b>665.000.000</b> | <b>659.249.019</b> | <b>848.487.841</b> | <b>809.803.654</b> | <b>95,44</b> | <b>801.446.625</b>   | <b>2.270.499.298</b> | <b>230,22</b> |
|  | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal</b>                                                                                                                      | <b>665.000.000</b> | <b>659.249.019</b> | <b>848.487.841</b> | <b>809.803.654</b> | <b>95,44</b> | <b>801.446.625</b>   | <b>2.270.499.298</b> | <b>230,22</b> |
|  | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha                                                                              | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi                                                                                                                                       | 140.000.000        | 159.629.623        | 117.095.453        | 115.869.040        | 98,95        | 106.047.011          | 381.545.674          | 322,04        |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |                   |       |                   |               |               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|---------------|---------------|
|  | dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                           | Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                   |       |                   |               |               |
|  | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                             | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 225.000.000       | 115.262.146       | 293.169.100       | 266.954.154       | 91,06 | 289.688.957       | 671.905.257   | 183,22        |
|  | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                       | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 300.000.000       | 384.357.250       | 438.223.288       | 426.980.460       | 97,43 | 448.104.121       | 1.259.441.831 | 225,54        |
|  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                             | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>60.000.000</b> | <b>47.222.759</b> | <b>47.262.115</b> | <b>46.874.500</b> | 99,18 | <b>51.988.327</b> | 146.085.586   | <b>311,54</b> |
|  | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                           | <b>Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sitem Pelayanan Perizinan berusaha terintegarsi Secara Elektronik</b>                                                                                                  | <b>60.000.000</b> | <b>47.222.759</b> | <b>47.262.115</b> | <b>46.874.500</b> | 99,18 | <b>51.988.327</b> | 146.085.586   | <b>311,54</b> |
|  | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                                                                          | 60.000.000        | 47.222.759        | 47.262.115        | 46.874.500        | 99,18 | 51.988.327        | 146.085.586   | 311,54        |





## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu koordinasi perumusan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu, dan fungsi perumusan kebijakan teknis dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi investor dan administrasi serta evaluasi terhadap pelayanan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Sesuai dengan Perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bidang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki tolak ukur pelayanan untuk menghasilkan mutu pelayanan prima yang terukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan kepastian hukum. Seiring dengan perubahan waktu dan sesuai dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, fungsi pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi hingga saat ini.

Dalam Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah menerbitkan beberapa bentuk dokumen perizinan yang dilayani. Adapun data rekap Jumlah Izin pada tabel berikut dibawah ini



*Tabel 1. Dokumen Perizinan yang diterbitkan Tahun 2023*

| No. DOKUMEN IZIN YANG TERBIT |                                           |        |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1.                           | Dokumen Izin Usaha Terbit                 | 3.525  |
| 2.                           | Dokumen Izin SIMBG                        | 20.717 |
| 3.                           | Dokumen Izin Registrasi                   | 2.125  |
| 4.                           | Dokumen Izin Usaha Perawat dan sejenisnya | 3.525  |
| 5.                           | Nomor Induk Berusaha (NIB dari OSS)       | 15.474 |

### **Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi**

Pada bagian ini menjelaskan tentang Realisasi Investasi, Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 Penanaman Modal atau investasi merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia. Setiap pelaku usaha atau penanaman modal yang menanamkan modal usaha di wilayah Republik Indonesia Wajib melakukan Kegiatan Laporan Penanaman Modal, hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha sehingga pemerintah dalam hal ini BKPM dapat mengetahui Realsisasi Investasi setiap tahunnya. Berikut Investasi dan Capaian Realisasi Investasi pada Tahun 2023 di Kota Jambi.

| Triwulan   | Jumlah Investasi | Proyek | TKI   | TKA |
|------------|------------------|--------|-------|-----|
| PMA TW I   | 19.151.200.000   | 32     | 14    | -   |
| PMDN TW I  | 233.596.100.000  | 666    | 1.565 | -   |
| PMA TW II  | 121.639.720.000  | 51     | 57    | -   |
| PMDN TW II | 402.506.800.000  | 626    | 999   | -   |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|              |                          |              |              |          |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|----------|
| PMA TW III   | 92.229.160.000           | 54           | 55           | 3        |
| PMDN TW III  | 193.355.600.000          | 855          | 981          | -        |
| PMA TW IV    | 21.890.680.000           | 37           | 8            | -        |
| PMDN TW IV   | 273.598.900.000          | 589          | 513          | 1        |
| <b>Total</b> | <b>1.357.968.160.000</b> | <b>2.910</b> | <b>4.192</b> | <b>4</b> |

Sumber : NSWI

**Capaian Realisasi Investasi Tahun 2023**

| <b>Sasaran Strategis</b>                | <b>Indikator Kinerja Utama</b>       | <b>Satuan</b> | <b>Target Renstra Tahun 2023 (Milyar)</b> | <b>Realisasi</b>  | <b>Capaian Tahun 2023 thd Renstra</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Meningkatnya Realisasi Investasi</b> | Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) | Rupiah        | 523.37                                    | 1.357.968.160.000 | 259,47%                               |

Sumber : NSWI dan OSS RBA

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan jumlah Realisasi Investasi di Kota Jambi yang dilaporkan Oleh pelaku usaha dari triwulan I s/d IV tahun 2023 melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan angka capaian realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp.1.357.968.160.000,00. Hal tersebut didapat melalui akumulasi LKPM Online yang telah disetujui oleh BKPM Pusat sebanyak 2.910 Proyek yang bergerak pada Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier.



Selanjutnya dapat dijelaskan rumusan indikator dan formulasi perhitungan antara target realisasi investasi dan Realisasi Investasi.

### Rumusan Indikator dan formulasi Perhitungan 2023

| Uraian                                        | Tahun 2022      | Tahun 2023        | Keterangan                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Target Realisasi Investasi<br>(Renstra/RPJMD) | 498.350.000.000 | 523.370.000.000   |                                                     |
| Realisasi Investasi                           | 744.785.075.000 | 1.357.968.160.000 |                                                     |
| Peningkatan Realisasi Investasi               |                 | 182,33 %          | $\frac{RI\ 2023 - RI\ 2022}{RI\ 2022} \times 100\%$ |
| Capaian Target Realisasi                      |                 | 259,47%           | $\frac{R.Investasi\ 2023}{RI\ Target} \times 100\%$ |

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas membantu Pemerintah Kota Jambi di bidang penanaman Modal, sasaran utama dari rencana kegiatan ini adalah para investor dalam dan luar negeri yang sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu**  
**Kota Jambi**

| N<br>O | Indikator<br>(IKU,SPM<br>,IKK) | Angka/<br>Nilai<br>Target/S<br>tandar<br>(IKU,SP<br>M,IKK) | Target Renstra PD |          |          | Realisasi Capaian |                   | Proyek<br>si | Catat<br>an<br>Anali<br>sis |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
|        |                                |                                                            | 2025              | 2026     | 2027     | 2022              | 2023              | 2024         |                             |
| 1      | Realisasi<br>Investasi         |                                                            | 575<br>M          | 600<br>M | 625<br>M | 744.785.075.000   | 1.357.968.160.000 | 550 M        |                             |

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah melakukan banyak perubahan dengan melengkapi sarana prasarana sesuai dengan SOP sebagai salah satu garda depan dalam hal pelayanan publik dan melengkapi informasi yang berkaitan dengan investasi sehingga diharapkan mendorong minat investor untuk berinvestasi di Kota Jambi. Dan perubahan ini dibuktikan dengan meningkatnya Investasi di Kota Jambi.

#### 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, dalam hal ini untuk penilaian IKM tahun 2023 dan 2024 tidak termasuk didalam RENJA OPD, tetapi didalam tujuan dan sasaran Daerah Kota Jambi hanya Realisasi Investasi, yang mana angka realisasi Investasi mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Untuk angka Realisasi Investasi yang ditargetkan dalam RENJA OPD Tahun 2025 sebesar RP 575 M.



### **2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD**

Semua Program atau Kegiatan pada DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2023 menunjang pada Keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana, sasaran strategis dinas yang merupakan IKU DPMPTSP tahun 2023 tercapai, Realisasi Investasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1.357.968.160.000 atau sebesar 182.43 %

### **2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian Program Nasional/Internasional. (SPM dan SDGs)**

Mengacu kepada visi misi dan Program Prioritas yang mengacu pada Renstra 2024 - 2026 yang mana salah satu dari Program Prioritas adalah Peningkatan Produktifitas Pengembangan Pariwisata dan Investasi Daerah guna menunjang penguatan stabilitas ekonomi untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mendorong Investasi Daerah.

### **2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.**

1. Sulitnya akses untuk masuk lebih jauh dalam melakukan Pengawasan nilai realisasi investasi di suatu perusahaan
2. Kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha terhadap kewajiban untuk melakukan pelaporan LKPM.
3. Pembangunan Sumber daya manusia dalam menghadapi investasi digital ekonomi.



4. Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana yang optimal terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.
5. Dukungan Anggaran yang memadai dari pemerintah Kota Jambi dalam mempromosikan peluang Investasi kepada para Investor.
6. Semakin Tingginya tuntutan penerapan teknologi Informasi dalam bidang promosi, pelayanan perizinan, Penyajian data investasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha.
7. Tidak adanya PERDA & PERKADA yang mengatur tentang reward dan Punishment Kepada Pelaku Usaha yang tidak mau melakukan kewajiban sebagai wajib LKPM.

#### **2.3.5 Formulasi Isu – Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan Fungsi DPMPTSP terdapat isu isu penting guna meningkatkan Realisasi Investasi di Kota Jambi yaitu :

1. Peningkatan Realisasi PMA dan PMDN dalam Mendukung pembiayaan pembangunan Daerah.
2. Peningkatan Pemenuhan Standar pelayanan.
3. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanan Berusaha
4. Peningkatan penyediaan data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan RKPDDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025 (terlampir) akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025 dengan hasil analisis



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

kebutuhan tahun 2025, hal ini disebabkan karena program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.





Tabel T-C 31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025  
KOTA JAMBI

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA JAMBI

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                |                   |                                                                                       |                                   |                   | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                              |                       |                                                                                             |                           |                    |                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| N<br>o              | PROGRAM/KEGIA<br>TAN                                                           | LOK<br>ASI        | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)/KEG<br>IATAN (OUTPUT)                    | TA<br>RG<br>ET<br>CA<br>PAI<br>AN | PAGU<br>INDIKATIF | PROGRAM/KEGIAT<br>AN                                                                  | LO<br>KA<br>SI        | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)/K<br>EGIATAN<br>(OUTPUT)                       | TAR<br>GET<br>CAP<br>AIAN | KEBUTUH<br>AN DANA | CATA<br>TAN<br>PENT<br>ING |
| 1                   | 2                                                                              | 3                 | 4                                                                                     | 5                                 | 6                 | 7                                                                                     | 8                     | 9                                                                                           | 10                        | 11                 | 12                         |
|                     | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOT<br>A | Kota<br>Jam<br>bi | Indeks<br>Reformasi<br>Birokrasi                                                      | 70                                | 9.004.000.000     | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA            | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi | Indeks<br>Reformasi<br>Birokrasi                                                            | 70                        | 9.004.000.0<br>00  |                            |
|                     | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah   | Kota<br>Jam<br>bi | Penilaian Nilai<br>Akip                                                               | 100<br>%                          | 134.000.000       | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah             | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi | Penilaian Nilai<br>Akip                                                                     | 100%                      | 134.000.00<br>0    |                            |
|                     | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                       | Kota<br>Jamb<br>i | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>sesuai ketentuan<br>yang berlaku | 4<br>Do<br>ku<br>me<br>n          | 54.000.000        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>sesuai ketentuan<br>yang berlaku | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah sesuai<br>ketentuan yang<br>berlaku | 4<br>Doku<br>men          | 54.000.000         |                            |
|                     |                                                                                |                   |                                                                                       |                                   |                   |                                                                                       |                       |                                                                                             |                           |                    |                            |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                  |            |                                                                                                   |            |                |                                                                                                   |            |                                                                                                   |            |                |  |
|--|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
|  |                                                                  |            |                                                                                                   |            |                |                                                                                                   |            |                                                                                                   |            |                |  |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Kota Jambi | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku                    | 5 Laporan  | 80.000.000     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku                    | Kota Jambi | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku                    | 5 Laporan  | 80.000.000     |  |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Kota Jambi | Tertib administrasi keuangan                                                                      | 100 %      | 5.047.0000.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                            | Kota Jambi | Tertib administrasi keuangan                                                                      | 100%       | 5.047.0000.000 |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kota Jambi | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku | 30 Orang   | 4.572.000.00   | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku | Kota Jambi | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku | 30 Orang   | 4.572.000.000  |  |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Jambi | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               | 28 Dokumen | 463.000.000    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                  | Kota Jambi | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                           | 28 Dokumen | 463.000.000    |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Kota Jambi | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan                  | 1 Laporan  | 5.000.000      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                       | Kota Jambi | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi                             | 1 Laporan  | 5.000.000      |  |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                               |             |                                                                                                                    |              |                      |                                                                                                                    |            |                                                                                                                    |             |                    |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|
|  |                                                                               |             | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                  |              |                      |                                                                                                                    |            | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan yang berlaku                                         |             |                    |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kota Jambi  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10 Laporan   | 7.000.000            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Jambi | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10 Laporan  | 7.000.000          |  |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Kota Jambi  | <b>Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>                                                          | <b>100 %</b> | <b>332.000.000</b>   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | Kota Jambi | <b>Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>                                                          | <b>100%</b> | <b>332.000.000</b> |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        | Kota Jambi  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 70 paket     | 200.000.000          | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | Kota Jambi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 70 paket    | 200.000.000        |  |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Kota Jambi  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 25 Orang     | 77.000.000           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         | Kota Jambi | Jumlah Bimtek Peraturan Perundang-Undang                                                                           | 25 Orang    | 77.000.000         |  |
|  |                                                                               |             |                                                                                                                    |              |                      |                                                                                                                    |            |                                                                                                                    |             |                    |  |
|  | <b>Administrasi</b>                                                           | <b>Kota</b> | <b>Cakupan</b>                                                                                                     | <b>100</b>   | <b>1.000.000.000</b> | <b>Administrasi</b>                                                                                                | <b>Kot</b> | <b>Cakupan</b>                                                                                                     | <b>100%</b> | <b>1.000.000.0</b> |  |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  | Umum Perangkat Daerah                                            | Jambi      | Pelayanan Administrasi Umum                                                        | %         |             | Umum Perangkat Daerah                                            | a Jambi    | Pelayanan Administrasi Umum                                                        |           | 00           |  |
|--|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Jambi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket   | 19.967.729  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Jambi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket   | 19.967.729   |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kota Jambi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 paket   | 200.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kota Jambi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 paket   | 2.00.000.000 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kota Jambi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket   | 150.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kota Jambi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket   | 150.000.000  |  |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Kota Jambi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 2 laporan | 250.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Kota Jambi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 2 laporan | 250.000.000  |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kota Jambi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan | 375.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kota Jambi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan | 375.000.000  |  |
|  |                                                                  |            |                                                                                    |           |             |                                                                  |            |                                                                                    |           |              |  |
|  | Pengadaan Barang Milik                                           | Kota Jambi | Cakupan Pelayanan                                                                  | 100 %     | 500.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah                                    | Kota Jambi | Cakupan Pelayanan                                                                  | 100%      | 500.000.000  |  |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  | <b>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>  | <b>bi</b>          | <b>Administrasi<br/>Umum</b>                                                           |                       |                      | <b>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>                     | <b>Ja<br/>mbi</b>               | <b>Administrasi<br/>Umum</b>                                                           |                   |                      |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
|  | Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kota Jamb i        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 2<br>Uni<br>t         | 150.000.000          | Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | <b>Ko<br/>ta<br/>Ja<br/>mbi</b> | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 2 Unit            | 150.000.000          |  |
|  | Pengadaan Mebel                                                   | Kota Jamb i        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 15<br>Uni<br>t        | 350.000.000          | Pengadaan Mebel                                                   | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi           | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 15Uni<br>t        | 350.000.00           |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | <b>Kota Jam bi</b> | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</b>                                             | <b>100 %</b>          | <b>1.139.000.000</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | <b>Kot a Ja mbi</b>             | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</b>                                             | <b>100%</b>       | <b>1.139.000.000</b> |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Kota Jamb i        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2<br>Lap<br>ora<br>n  | 544.000.000          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2<br>Lapora<br>n  | 544.000.00           |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Kota Jamb i        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 31<br>Lap<br>ora<br>n | 595.000.000          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang                              | 31<br>Lapora<br>n | 595.000.000          |  |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                             |                  |                    |                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                               |             |                         |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--|
|  |                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                             |                  |                    |                                                                                                                                      |                                 | Disediakan                                                                                                                                    |             |                         |  |
|  | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                     | <b>Kota<br/>Jam<br/>bi</b> | <b>Cakupan<br/>Pelayanan<br/>Administrasi<br/>Umum</b>                                                                      | <b>100<br/>%</b> | <b>852.000.000</b> | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                     | <b>Kot<br/>a<br/>Ja<br/>mbi</b> | <b>Cakupan<br/>Pelayanan<br/>Administrasi<br/>Umum</b>                                                                                        | <b>100%</b> | <b>852.000.00<br/>0</b> |  |
|  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Kota<br>Jamb<br>i          | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 34<br>Unit       | 20.000.000         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi           | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya                | 34<br>Unit  | 20.000.000              |  |
|  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan  | Kota<br>Jamb<br>i          | Jumlah<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya    | 27<br>Unit       | 382.000.000        | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan   | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi           | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan | 27<br>Unit  | 382.000.00<br>0         |  |
|  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Kota<br>Jamb<br>i          | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                 | 77<br>Unit       | 150.000.000        | Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                       | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi           | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                   | 77<br>Unit  | 150.000.00<br>0         |  |
|  | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                   | Kota<br>Jamb<br>i          | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang                               | 1<br>Unit        | 300.000.000        | Pemeliharaan/Rehab<br>ilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                               | Kot<br>a<br>Ja<br>mbi           | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang                                                 | 1 Unit      | 300.000.00<br>0         |  |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                                                                |                   |                                                                                                   |              |                    |                                                                                                                |                   |                                                                                                   |             |                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|
|  |                                                                                                                |                   | Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         |              |                    |                                                                                                                |                   | Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         |             |                    |  |
|  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                              | <b>Kota Jambi</b> | <b>Meningkatnya Jumlah investor dalam berInvestasi</b>                                            | <b>100 %</b> | <b>87.000.000</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                              | <b>Kota Jambi</b> | <b>Meningkatnya Jumlah investor dalam berInvestasi</b>                                            | <b>100%</b> | <b>87,000,000</b>  |  |
|  | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Jambi        | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen    | 87.000.000         | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Jambi        | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen   | 87.000.000         |  |
|  | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                         | <b>Kota Jambi</b> | <b>Peningkatan Jumlah Rencana Investasi</b>                                                       | <b>100 %</b> | <b>250.000.000</b> | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                         | <b>Kota Jambi</b> | <b>Peningkatan Jumlah Rencana Investasi</b>                                                       | <b>100%</b> | <b>250.000.000</b> |  |
|  | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                          | Kota Jambi        | Terpromosinya informasi peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Jambi               | 2 Dokumen    | 250.000.000        | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                          | Kota Jambi        | Terpromosinya informasi peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Jambi               | 2 Dokumen   | 250.000.000        |  |
|  | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                    | Kota Jambi        | Tersusunnya Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota      | 2 Dokumen    | 250.000.000        | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                    | Kota Jambi        | Tersusunnya Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota      | 2 Dokumen   | 250.000.000        |  |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                    |                  |                    |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                         |                  |                    |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|
|  |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                    |                  |                    |                                                                                                                                         | a                 |                                                                                                                                         |                  |                    |  |
|  | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Kota Jambi        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                               | 2 Dokumen        | 250.000.000        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                    | Kota Jambi        | Pelaksanaan Promosi Investasi di dalam dan luar Kota Jambi                                                                              | 2 Dokumen        | 250.000.000        |  |
|  | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                | <b>Kota Jambi</b> | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>                                                                   | <b>88</b>        | <b>806.300.000</b> | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                | <b>Kota Jambi</b> | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>                                                        | <b>88</b>        | <b>806.300.000</b> |  |
|  | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Jambi        | Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                                                                                | 90 %             | 806.300.000        | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Jambi        | Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                                                                     | 90%              | 806.300.000        |  |
|  | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | Kota Jambi        | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 300 Pelaku Usaha | 541.300.000        | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | Kota Jambi        | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara | 300 Pelaku Usaha | 541.300.000        |  |





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                                                                                                                           |            |                                                                                                                           |                    |              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--|
|  |                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                                                                                                                           |            | Elektronik                                                                                                                |                    |              |  |
|  | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Kota Jambi | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 200 Kegiatan Usaha | 90.000.000   | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                 | Kota Jambi | Jumlah Sarana dan Prasarana serta Ijin Usaha yang memenuhi Komitmen                                                       | 200 Kegiatan Usaha | 90.000.000   |  |
|  | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko           | Kota Jambi | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                | 3500 Pelaku Usaha  | 75.000.000   | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Kota Jambi | Penurunan Tingkat Pengaduan Konsultasi dari tahun Sebelumnya                                                              | 3500 Pelaku Usaha  | 75.000.000   |  |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                  | Kota Jambi | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | 1 Dokumen          | 100.000.0000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                 | Kota Jambi | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen          | 100.000.0000 |  |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                            |                                                |                    |                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                             |                                      |                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|  |                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                            |                                                |                    |                                                                                                                                         | a                               |                                                                                                                                                             |                                      |                         |  |
|  | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>PELAKSANAAN<br/>PENANAMAN<br/>MODAL</b>                                                                 | <b>Kota<br/>Jam<br/>bi</b> | <b>Tercapainya<br/>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat<br/>Terhadap<br/>Pelayanan<br/>Perizinan dan<br/>Non Perizinan</b>                                                       | <b>100<br/>%</b>                               | <b>665.000.000</b> | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>PELAKSANAAN<br/>PENANAMAN<br/>MODAL</b>                                                                 | <b>Kot<br/>a<br/>Ja<br/>mbi</b> | <b>Tercapainya<br/>Indeks<br/>Kepuasan<br/>Masyarakat<br/>Terhadap<br/>Pelayanan<br/>Perizinan dan<br/>Non Perizinan</b>                                    | <b>100%</b>                          | <b>665.000.00<br/>0</b> |  |
|  | <b>Pengendalian<br/>Pelaksanaan<br/>Penanaman<br/>Modal yang<br/>menjadi<br/>Kewenangan<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>               | <b>Kota<br/>Jamb<br/>i</b> | <b>Tercapainya<br/>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat<br/>Terhadap<br/>Pelayanan<br/>Perizinan dan<br/>Non Perizinan</b>                                                       | <b>100<br/>%</b>                               | <b>665.000.000</b> | <b>Pengendalian<br/>Pelaksanaan<br/>Penanaman Modal<br/>yang menjadi<br/>Kewenangan<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                   | <b>Kot<br/>a<br/>Ja<br/>mbi</b> | <b>Tercapainya<br/>Indeks<br/>Kepuasan<br/>Masyarakat<br/>Terhadap<br/>Pelayanan<br/>Perizinan dan<br/>Non Perizinan</b>                                    | <b>100%</b>                          | <b>665.000.00<br/>0</b> |  |
|  | <b>Penyelesaian<br/>Permasalahan dan<br/>Hambatan yang<br/>dihadapi Pelaku<br/>Usaha dalam<br/>merealisasikan<br/>Kegiatan Usahanya</b> | <b>Kota<br/>Jamb<br/>i</b> | <b>Jumlah<br/>Penyelesaian<br/>Permasalahan<br/>dan Hambatan<br/>yang dihadapi<br/>Pelaku Usaha<br/>dalam<br/>merealisasikan<br/>Kegiatan<br/>Usahanya</b>                 | <b>9<br/>Keg<br/>iat<br/>an<br/>Usa<br/>ha</b> | <b>140.000.000</b> | <b>Penyelesaian<br/>Permasalahan dan<br/>Hambatan yang<br/>dihadapi Pelaku<br/>Usaha dalam<br/>merealisasikan<br/>Kegiatan Usahanya</b> | <b>Kot<br/>a<br/>Ja<br/>mbi</b> | <b>Jumlah<br/>Penyelesaian<br/>Permasalahan<br/>dan Hambatan<br/>yang dihadapi<br/>Pelaku Usaha<br/>dalam<br/>merealisasikan<br/>Kegiatan<br/>Usahanya</b>  | <b>9<br/>Kegiat<br/>an<br/>Usaha</b> | <b>140.000.00<br/>0</b> |  |
|  | <b>Bimbingan Teknis<br/>kepada Pelaku<br/>Usaha</b>                                                                                     | <b>Kota<br/>Jamb<br/>i</b> | <b>Jumlah Pelaku<br/>Usaha yang<br/>Mengikuti<br/>Bimbingan Teknis/<br/>Sosialisasi<br/>Implementasi<br/>Perizinan<br/>Berusaha<br/>Berbasis Risiko<br/>dan Pengawasan</b> | <b>450<br/>Pel<br/>aku<br/>Usa<br/>ha</b>      | <b>225.000.000</b> | <b>Bimbingan Teknis<br/>kepada Pelaku<br/>Usaha</b>                                                                                     | <b>Kot<br/>a<br/>Ja<br/>mbi</b> | <b>Jumlah Pelaku<br/>Usaha yang<br/>Mengikuti<br/>Bimbingan<br/>Teknis/<br/>Sosialisasi<br/>Implementasi<br/>Perizinan<br/>Berusaha<br/>Berbasis Risiko</b> | <b>450<br/>Pelaku<br/>Usaha</b>      | <b>225.000.00<br/>0</b> |  |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  |                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|
|  |                                                                                                         |                   | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                                                                                                         |                   | dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                                                                                                                            |                    |                   |  |
|  | Pengawasan Penanaman Modal                                                                              | Kota Jambi        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 400 Kegiatan Usaha | 300.000.000       | Pengawasan Penanaman Modal                                                                              | Kota Jambi        | umlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 400 Kegiatan Usaha | 300.000.000       |  |
|  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                    | <b>Kota Jambi</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>100 %</b>       | <b>60.000.000</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                    | <b>Kota Jambi</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>                                                                                                                                                                                                | <b>100%</b>        | <b>60.000.000</b> |  |
|  | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah</b> | <b>Kota Jambi</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8 Dokumen</b>   | <b>60.000.000</b> | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah</b> | <b>Kota Jambi</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 Dokumen</b>   | <b>60.000.000</b> |  |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|  | Kabupaten/Kota                                                                                                                                 |            |                                                                              |           |                   | Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                |           |                   |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|
|  | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota Jambi | Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Tingkat Kota | 8 Dokumen | <b>60.000.000</b> | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota Jambi | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 8 Dokumen | <b>60.000.000</b> |  |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagan ini belum ada hasil kajian terhadap program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung di tujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan Informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/Kota.

Tabel T-C.32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| 1  | 2                | 3      | 4                 | 5              | 6       |
|    |                  |        |                   |                |         |
|    |                  |        |                   |                |         |



### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi adalah Unsur Pelaksana otonomi Daerah untuk menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, berdasarkan telaah dan sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional terdapat berbagai Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Jambi diantaranya terkait dengan Birokrasi dengan tata kelola, Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta Inovasi teknologi sebagai penunjang kelancaran Pelayanan Publik dalam hal Perizinan di Kota Jambi.

Dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu meningkatkan kemudahan berusaha sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang sering disebut dengan *Online Single Submission (OSS)* serta amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**Tabel 3.1**  
**Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Jambi**

| No | Prioritas                                                           | Sasaran                              | Indikator Sasaran Daerah | Sasaran Perangkat Daerah  | Indikator Sasaran Perangkat Daerah |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1  | 2                                                                   | 3                                    | 4                        | 5                         | 6                                  |
| 1  | Peningkatan Produktifitas, Pengembangan Pariwisata Investasi Daerah | Peningkatan Kinerja Investasi Daerah | Realisasi Investasi      | Jumlah Investasi PMA/PMDN | Realisasi Investasi                |

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan Tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi adalah Meningkatkan Investasi di Kota Jambi.

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan strategi dan langkah – langkah yang akan dilakukan DPMPTSP Kota Jambi sebagai berikut :

1. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memberikan Pelayanan Prima kepada Investor pada khususnya dan Masyarakat Kota Jambi pada umumnya.
2. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi.



3. Melakukan proses penyederhanaan proses pelayanan perizinan dan investasi.
4. Meningkatkan motivasi dan inisiatif masyarakat untuk mengurus legalitas usahanya agar masyarakat dapat berusaha dengan tenang dan nyaman.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Menarik minat dan mendatangkan para Investor untuk berinvestasi di Kota Jambi dengan cara memberikan informasi Peluang Investasi dan Peta Potensi yang ada di Kota Jambi dari berbagai Sektor
7. Gencar untuk terus mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kota Jambi.

**Tabel 3.2.1**

**Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi**

| No | Tujuan Perangkat Daerah              | Indikator Tujuan Perangkat Daerah | Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025 |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Peningkatan Kinerja Investasi Daerah | Realisasi Investasi               | 575 M                                             |

**Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal.





3. Meningkatnya Realisasi Investasi.
4. Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan data dan informasi penanaman modal.
5. Terciptanya kepercayaan publik terhadap integritas DPMPTSP Kota Jambi.
6. Terbangunnya sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan elektronik sehingga bisa diakses dengan mudah oleh publik.
7. Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Jambi.

**Tabel 3.2.2**  
**Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Jambi**

| No | Sasaran Perangkat Daerah           | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 |
|----|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN | Realisasi Investasi                | 575 M                                              |

**Tabel 3.2.3**  
**Sasaran Indikator Kinerja Utama**

| No | Indikator Kinerja Utama | Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Realisasi Investasi     | 575 M                                                      |



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 1. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

##### a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

##### Visi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam beberapa tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk tahun 2025 adalah :

***“PENGUATAN STABILITAS EKONOMI DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAERAH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL SERTA LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN”***

## Sasaran dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

| No | Sasaran Perangkat Daerah             | Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan     |                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peningkatan Kinerja Investasi Daerah | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b> |                                                                                                                                           |
|    |                                      | <b>Kegiatan:</b>                       | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota |
|    |                                      | <b>Sub Kegiatan</b>                    | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota |
|    |                                      |                                        | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik                  |

## 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

### Jumlah Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2025 berisi



program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai kewenangan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya di jadikan acuan bagi perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Program dan kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan – kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tahun 2025 adalah Program sebanyak 6 Program dan 12 Kegiatan.

### **3. Tabel Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat Daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 di sajikan pada tabel T-C 33 penyajian program dan kegiatan di lakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan Pemerintahan yang di maksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas Pembangunan tahun 2025



**T-C.33**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**

**Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Jambi**

**Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi**

| Ko<br>de | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program/ Kegiatan |                                                                           | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                       | Rencana Tahun 2025 |                              |                                     |                | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2026 |                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                    |                                                                           |                                                                             | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Sumber<br>Dana | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| 1        | 2                                                                  |                                                                           | 3                                                                           | 4                  | 5                            | 6                                   | 7              | 9                                    | 10                                  |
| I        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA  |                                                                           | Indeks Reformasi<br>Birokrasi                                               | Kota<br>Jambi      | 100%                         | 9.004.000.000                       | APBD<br>KOTA   | 100%                                 | 10.129.361.538                      |
| 1        | Kegiatan:                                                          | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Peningkatan nilai<br>AKIP                                                   | Kota<br>Jambi      | 100%                         | 134.000.00                          | APBD<br>KOTA   | 100%                                 | 146.069.735                         |
|          | Sub<br>Kegiatan                                                    | 1 Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                           | Kota<br>Jambi      | 4 Dokumen                    | 54.000.000                          | APBD<br>KOTA   | 4 Dokumen                            | 59.038.474                          |
|          |                                                                    | 2 Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Kota<br>Jambi      | 5 Laporan                    | 80.000.000                          | APBD<br>KOTA   | 5 Laporan                            | 87.031.261                          |
| 2        | Kegiatan:                                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                 | Pelaksanaan<br>administrasi tugas<br>dan fungsi opd<br>berjalan dengan baik | Kota<br>Jambi      | 100%                         | 5.047.000.000                       | APBD<br>KOTA   | 100%                                 | 5.549.059.803                       |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|   |                     |   |                                                                               |                                                                                                                                                       |            |            |               |           |            |               |
|---|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
|   | Sub<br>Kegiat<br>an | 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | -Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku<br>- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Kota Jambi | 30 Orang   | 4.572.000.000 | APBD KOTA | 31 Orang   | 5.028.242.070 |
|   |                     | 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                   | Kota Jambi | 28 Dokumen | 463.000.000   | APBD KOTA | 28 Dokumen | 508.468.090   |
|   |                     | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                    | Kota Jambi | 1 Laporan  | 5.000.000     | APBD KOTA | 1 Laporan  | 4.985.810     |
|   |                     | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD    | Kota Jambi | 9 Laporan  | 7.000.000     | APBD KOTA | 9 Laporan  | 7.363.833     |
| 3 | Kegiatan:           |   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>                                                                                             | Kota Jambi | 100%       | 332.000.000   | APBD KOTA | 100%       | 374.232.000   |
|   | Sub kegiatan        | 7 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Penyediaan pakaian dinas harian                                                                                                                | Kota Jambi | 70 Paket   | 200.000.000   | APBD KOTA | 70 Paket   | 230.000.000   |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|          |                     |    |                                                                         |                                                                                        |            |             |                      |           |               |                      |
|----------|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|
|          |                     | 8  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota Jambi | 25 Orang    | 132.000.000          | APBD KOTA | 30 Orang      | 144.232.000          |
| <b>4</b> | <b>Kegiatan</b>     |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Peningkatan nilai AKIP</b>                                                          | Kota Jambi | <b>100%</b> | <b>1.000.000.000</b> | APBD KOTA | <b>100%</b>   | <b>1.185.000.000</b> |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | 9  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Kota Jambi | 9 Paket     | 25.000.000           | APBD KOTA | 9 Paket       | 35.000.000           |
|          |                     | 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Kota Jambi | 3 Paket     | 200.000.000          | APBD KOTA | 3 Paket       | 250.000.000          |
|          |                     | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan                                   | Kota Jambi | 2 Paket     | 150.000.000          | APBD KOTA | 2 Paket       | 200.000.000          |
|          |                     | 12 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu                                | Kota Jambi | 2 laporan   | 250.000.0000         | APBD KOTA | 2 laporan     | 300.000.000          |
|          |                     | 13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kota Jambi | 2 laporan   | 375.000.000          | APBD KOTA | 2 laporan     | 400.000.000          |
| <b>5</b> | <b>Kegiatan:</b>    |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Meningkatnya kinerja pelayanan</b>                                                  | Kota Jambi | <b>100%</b> | <b>500.000.000</b>   | APBD KOTA | <b>100%</b>   | <b>600.000.000</b>   |
|          |                     | 14 | Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | Kota Jambi | 2Unit       | <b>150.000.000</b>   | APBD KOTA | <b>2 Unit</b> | <b>200.000.000</b>   |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|          |                     |    |                                                                                                                    |                                                                                                                         |            |             |                      |           |             |                      |
|----------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | 15 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                      | Kota Jambi | 15 Unit     | 350.000.000          | APBD KOTA | 15 Unit     | 400.000.000          |
| <b>6</b> | <b>Kegiatan:</b>    |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik</b>                                               | Kota Jambi | 100%        | <b>1.139.000.000</b> | APBD KOTA | 100%        | <b>1.250.000.000</b> |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> | 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Pemadam Kebakaran , Jumlah Daya Internet Jumlah Daya Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air, Jumlah Tagihan Telepon | Kota Jambi | 2Laporan    | 544.000.000          | APBD KOTA | 2 Laporan   | 600.000.000          |
|          |                     | 17 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Tenaga adminstras, jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor                                         | Kota Jambi | 31 Laporan  | 595.000.000          | APBD KOTA | 31 Laporan  | 600.000.000          |
| <b>7</b> | <b>Kegiatan:</b>    |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</b>                                                                              | Kota Jambi | <b>100%</b> | <b>852.000.000</b>   | APBD KOTA | <b>100%</b> | <b>1.025.000.000</b> |
|          | <b>Sub kegiatan</b> | 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                  | Kota Jambi | 34 Unit     | 20.000.000           | APBD KOTA | 34 Unit     | 30.000.000           |





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|    |                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                        |            |                   |                   |                  |                   |                   |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                       | 21                                                                                                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kota Jambi | 27 Unit           | 382.000.000       | APBD KOTA        | 27 Unit           | 400.000.000       |
|    |                                                       | 22                                                                                                                    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Kota Jambi | 77 Unit           | 150.000.000       | APBD KOTA        | 77 Unit           | 200.000.000       |
|    |                                                       | 23                                                                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor yang Terpelihara                                        | Kota Jambi | 1 Unit            | 190.000.000       | APBD KOTA        | 1 Unit            | 250.000.000       |
|    |                                                       | 24                                                                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor yang Terpelihara                                        | Kota Jambi | 1 Unit            | 300.000.000       | APBD KOTA        | 1 Unit            | 400.000.000       |
| II | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM<br/>PENANAMAN MODAL</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                  | <b>Peningkatan Jumlah Investor berskala Nasional yang berinvestasi di Kota Jambi</b>                   | Kota Jambi | <b>2 Investor</b> | <b>87.000.000</b> | APBD KOTA        | <b>2 Investor</b> | <b>90.000.000</b> |
| 8  | Kegiatan:                                             | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                  |                                                                                                        | Kota Jambi | <b>1 Dokumen</b>  | <b>87.000.000</b> | <b>APBD KOTA</b> | <b>1 Dokumen</b>  | <b>90.000.000</b> |
|    | Sub Kegiatan                                          | 25                                                                                                                    | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                   | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal      | Kota Jambi | 1 Dokumen         | 87.000.000        | APBD KOTA        | 1 Dokumen         | 90.000.000        |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|     |                                   |    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |            |                   |             |           |                   |               |
|-----|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|
| III | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   |    |                                                                                                                                         | Peningkatan Jumlah Calon Investor/Pengunjung                                                                                                       | Kota Jambi | 100%              | 250.000.000 | APBD KOTA | 10%               | 300.000.000   |
| 10  | Kegiatan:                         |    | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Terpromosinya informasi peluang dan Potensi Penanaman Modal di Kota Jambi                                                                          | Kota Jambi | 100%              | 250.000.000 | APBD KOTA | 100%              | 300.000.000   |
|     |                                   | 26 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                               | Kota Jambi | 1 Dokumen         | 250.000.000 | APBD KOTA | 1 Dokumen         | 300.000.000   |
| IV  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL |    |                                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                                                          | Kota Jambi | 88                | 806.300.000 | APBD KOTA | 88                | 2.115.000.000 |
| 11  | Kegiatan:                         |    | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pelayanan Perizinan konsultasi, pendampingan serta pengaduan Perizinan                                                               | Kota Jambi | 100%              | 806.300.000 | APBD KOTA | 100%              | 2.115.000.000 |
|     | Sub Kegiatan                      | 27 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Kota Jambi | 4000 Pelaku Usaha | 541.300.000 | APBD KOTA | 4000 Pelaku Usaha | 970.000.000   |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|    |                                                         |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |            |                    |             |           |                    |             |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|    |                                                         | 28                                                                                            | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | Kota Jambi | 200 Kegiatan Usaha | 90.000.000  | APBD KOTA | 200 Kegiatan Usaha | 95.000.000  |
|    |                                                         | 29                                                                                            | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko           | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                        | Kota Jambi | 250 Pelaku Usaha   | 75.000.000  | APBD KOTA | 250 Pelaku Usaha   | 80.000.000  |
|    |                                                         | 30                                                                                            | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                  | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | Kota Jambi | 1 Dokumen          | 100.000.000 | APBD KOTA | 1 Dokumen          | 970.000.000 |
| V  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b> |                                                                                               |                                                                                            | <b>ketaatan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Oleh Investor (LKPM)</b>                                                                                                                           | Kota Jambi | 50%                | 665.000.000 | APBD KOTA | 50%                | 930.000.000 |
| 12 | Kegiatan:                                               | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                            | <b>Ketaatan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM)</b>                                                                                                                           | Kota Jambi | 100%               | 665.000.000 | APBD KOTA | 100%               | 930.000.000 |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|           |                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |             |                  |                    |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|
|           | Sub Kegiatan                                                         | 31                                                                                                                     | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               | Kota Jambi        | 9 Dokumen          | 140.000.000 | APBD KOTA        | 9 Dokumen          | 150.000.000       |
|           |                                                                      | 32                                                                                                                     | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | Kota Jambi        | 450 Pelaku Usaha   | 225.000.000 | APBD KOTA        | 450 Pelaku Usaha   | 230.000.000       |
|           |                                                                      | 33                                                                                                                     | Pengawasan Penanaman Modal                                                                               | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kota Jambi        | 400 Kegiatan Usaha | 300.000.000 | APBD KOTA        | 400 Kegiatan Usaha | 550.000.000       |
| <b>VI</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b> |                                                                                                                        |                                                                                                          | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>                                                                                                                                                                                                 | Kota Jambi        | <b>100%</b>        | 60.000.000  | APBD KOTA        | <b>100%</b>        | <b>80.000.000</b> |
| <b>13</b> | <b>Kegiatan</b>                                                      | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                          | <b>Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sitem Pelayanan Perizinan berusaha terintegarsi Secara Elektronik</b>                                                                                                  | <b>Kota Jambi</b> | <b>9 Dokumen</b>   | 60.000.000  | <b>APBD KOTA</b> | <b>9 Dokumen</b>   | <b>80.000.000</b> |



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

|              |              |    |                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |           |                       |           |           |                       |
|--------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|              | Sub Kegiatan | 34 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Tingkat Kota | Kota Jambi | 9 Dokumen | 60.000.000            | APBD KOTA | 9 Dokumen | 80.000.000            |
| <b>Total</b> |              |    |                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |           | <b>10.872.300.000</b> |           |           | <b>13.694.361.538</b> |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen Perencanaan tahunan yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada anggaran Tahun 2025. Renja ini secara substansial merupakan bagian dari perencanaan awal tahun pada pembangunan jangka menengah daerah Kota Jambi, dengan penyesuaian terkait periode kepemimpinan kepala Daerah. Dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2025 ini telah menyelaraskan pada arah kebijakan pembangunan Nasional Kota Jambi Tahun 2025.

Dalam perkembangannya jika terdapat perubahan kondisi makro nasional maupun daerah atau terdapat kebijakan lainnya maka dimungkinkan untuk mengubah dokumen ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebagai perubahan Renja Tahun 2025. Perubahan berikutnya terhadap isi dokumen Renja Tahun 2024 ini hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar – benar di luar dugaan, dan adanya kebijakan nasional yang perlu diakomodir oleh DPMPTSP Kota Jambi. Sebelum adanya perubahan dokumen ini maka Renja ini digunakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berlangsung.

Penyusunan Renja didahului dengan mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, memperhatikan arah dan prioritas kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta target capaian rencana strategis lembaga. Dalam hal ini rencana strategis lembaga belum terdapat dokumen Resmi maka didasarkan pada rancangan Renstra yang telah di susun. Usulan program dan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, memperhitungkan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya serta mengacu pada perencanaan jangka panjang dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Jambi, 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



**YON HERI, SP, ME**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19690801 199703 1 007